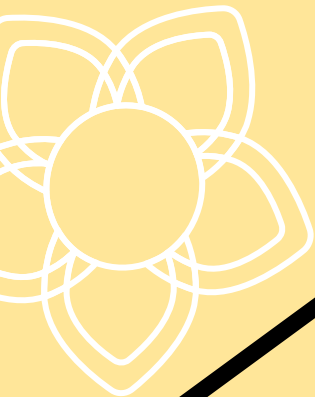
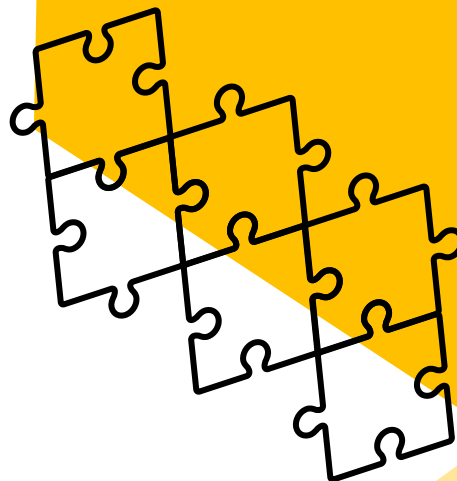


# PEMERINTAH KOTA CILEGON



## KUA TA 2026

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2026



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KOTA CILEGON**



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON**  
**NOMOR : X/BA/DPRD-40/2025**  
**NOMOR : 900.1/2430/BPKPAD**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ROBINSAR**  
Jabatan : Walikota Cilegon  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 2 - Cilegon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **RIZKI KHAIRUL ICHWAN, S.IP.,M.IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- b. Nama : **H. SOKHIDIN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- c. Nama : **H. MASDUKI, S.Ag.,SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Cilegon, 31 Oktober 2025

**WALIKOTA CILEGON,**

**Selaku PIHAK KESATU**



**ROBINSAR**

**PIMPINAN DPRD KOTA CILEGON,**

**Selaku PIHAK KEDUA**



**RIZKI KHAIRUL ICHWAN, S.IP.,M.IP**  
KETUA



**H. SOKHIDIN, SH**  
WAKIL KETUA



**H. MASDUKI, S.Ag.,SH**  
WAKIL KETUA

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Cilegon Tahun 2026 telah selesai disusun tepat waktu. KUA Kota Cilegon Tahun 2026 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum APBD meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2026. KUA Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025- 2029.

Demikian kata pengantar ini, semoga proses perencanaan dan penganggaran daerah Kota Cilegon dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM – APBD TAHUN ANGGARAN 2026 .....	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026 .....	2
1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 .....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	7
5.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	7
5.1.1 Proyeksi Ekonomi Nasional .....	12
5.1.2 Proyeksi Ekonomi Regional.....	15
5.1.3 Proyeksi Ekonomi Daerah .....	17
5.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	19
BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2026.....	21
3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN RAPBN .....	21
3.2 ASUMSI DASAR RAPBD PROVINSI.....	25
3.3 ASUMSI DASAR RAPBD KOTA CILEGON.....	27
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH .....	32
4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH .....	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	37
5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA .....	37
5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA .....	44
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	45
6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN .....	45
6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .....	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....	47
BAB VIII PENUTUP .....	58

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Indikator Makro Perekonomian Daerah.....	18
Tabel 2 Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2026.....	36
Tabel 3 Rencana Belanja Daerah Kota Cilegon .....	44
Tabel 4 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Cilegon Tahun 2026.....	46
Tabel 5 Arah kebijakan Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 -2045 (RPJMD 2025-2029).....	47

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM – APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

Tahapan awal perencanaan pembangunan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 adalah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2026. Penganggaran merupakan tahapan selanjutnya dari proses perencanaan, dimana target kinerja yang sudah ditetapkan dalam proses perencanaan diturunkan dalam uraian tahapan dan kegiatan yang sudah berbasis output dan berbasis anggaran. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Cilegon yang akan menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2026 berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2026 sejatinya merupakan tahun transisi dari periode RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021-2026. Namun dengan dilaksanakannya pilkada serentak se-Indonesia di penghujung tahun 2024, seluruh periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia diseragamkan menjadi 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, tahun 2026 yang awalnya merupakan tahun

transisi, berubah menjadi tahun perencanaan awal dimana kebijakan RPJPD 2025-2045 yang mengacu pada RPJPN sudah harus tertuang ke dalam muatan-muatan kebijakan dalam dokumen RKPD 2026. RKPD 2026 juga harus sudah mengadopsi arah kebijakan dan janji politis Wali Kota terpilih secara utuh.

Secara substansi, KUA memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang menjabarkan lebih lanjut tentang :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan KUA tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator makro ekonomi daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah.

## **1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. KUA ini juga menjadi pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2026. Dengan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya.

### **1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

Dasar Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah

Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2026.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Kebijakan Umum APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 meliputi 8 bab sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan, tujuan penyusunan dan dasar (hukum) penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

##### **BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Menguraikan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

##### **BAB III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD**

Menjelaskan tentang asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam perumusan dan penyusunan APBN dan APBD.

##### **BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kebijakan perencanaan pendapatan daerah serta target pendapatan daerah.

##### **BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Menjelaskan tentang kebijakan terkait perencanaan belanja daerah serta rencana belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer dan belanja tidak terduga.

##### **BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Menjelaskan kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

#### **BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN**

Menjelaskan tentang langkah konkret dalam mencapai target.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah, aspek perencanaan memiliki peranan yang sangat penting. Perencanaan pembangunan akan memberikan arahan bagi pemerintah dalam melakukan aktivitasnya. Tercapainya tujuan-tujuan pembangunan daerah bergantung pada pelaksanaan tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **5.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Pertumbuhan global diproyeksikan akan melemah sesuai dengan revisi pada Prediksi Ekonomi Dunia (WEO) April 2025, yakni sebesar 3,3 persen pada tahun 2024 dan 2.8 persen pada tahun 2025. Penurunan sebesar 0.5 persen dari proyeksi pertumbuhan pada bulan Januari 2025. Penurunan tersebut diakibatkan oleh pergeseran pada kondisi geo-politik dari blok ekonomi utama di Dunia. Kebijakan pemberian tarif oleh Amerika Serikat kepada mayoritas negara-negara di dunia memberikan tekanan kepada saluran ekspor bagi negara yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan ekspornya, disisi lain balasan terhadap tarif yang ditetapkan secara unilateral memiliki kontribusi terhadap melemahnya aktivitas ekonomi secara global.

Meskipun ekspor Indonesia ke AS hanya menyumbang sekitar 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dampak tidak langsung dari kebijakan tarif AS cukup signifikan. Penurunan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Jepang, yang juga terdampak oleh tarif AS, berpotensi menurunkan permintaan terhadap ekspor Indonesia. Selain itu, ketidakpastian global

mendorong investor untuk memindahkan portofolio mereka ke aset yang dianggap lebih aman, seperti obligasi AS, yang dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Indonesia terdampak dalam beberapa dimensi:

- **Nilai tukar dan inflasi:** Menguatnya dolar AS menyebabkan rupiah melemah, mendorong biaya impor naik dan meningkatkan tekanan inflasi domestik, terutama pada sektor energi dan pangan.
- **Perlambatan ekspor:** Turunnya permintaan global, khususnya dari Tiongkok dan AS, menyebabkan penurunan ekspor komoditas utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan baja.
- **Penurunan investasi asing:** Ketidakpastian global dan relokasi rantai pasok menyebabkan perlambatan FDI, khususnya di sektor manufaktur dan hilirisasi sumber daya alam.

Namun, ada peluang jangka panjang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai alternatif basis produksi di kawasan Indo-Pasifik jika mampu menciptakan iklim investasi yang stabil.

Provinsi Banten, khususnya Kota Cilegon, yang merupakan pusat industri berat dan petrokimia, sangat bergantung pada ekspor dan impor bahan baku. Kebijakan tarif AS dapat mengurangi permintaan global terhadap produk industri, sehingga menurunkan volume ekspor dari kawasan ini. Selain itu, gangguan pada rantai pasok global dapat mempersulit akses terhadap bahan baku impor yang diperlukan untuk produksi, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi daya saing industri lokal

Banten merupakan provinsi industri strategis yang menyumbang signifikan terhadap PDB nasional. Terdapat beberapa risiko spesifik terhadap perubahan kondisi geopolitik yang terjadi:

- **Pelemahan sektor manufaktur:** Banten sangat tergantung pada ekspor berbasis industri berat dan petrokimia. Penurunan permintaan global akan berdampak pada utilisasi kapasitas pabrik dan efisiensi produksi.
- **Terganggunya rantai pasok:** Kebijakan perdagangan AS mengubah jalur distribusi bahan baku dan barang jadi, memicu kenaikan biaya logistik

dan produksi di kawasan industri seperti Tangerang dan Serang.

Cilegon, sebagai pusat industri baja nasional (melalui PT Krakatau Steel dan perusahaan turunannya), sangat sensitif terhadap dinamika perdagangan global. Dampaknya meliputi:

- **Tekanan pada ekspor baja:** Tarif AS terhadap baja asing mempersempit akses pasar global bagi produk baja Indonesia, termasuk dari Cilegon.
- **Kenaikan harga energi dan bahan baku:** Produksi baja sangat energi-intensif. Kenaikan biaya impor energi dan bahan penolong berdampak langsung pada margin keuntungan industri di Cilegon.

**Risiko PHK dan perlambatan ekonomi lokal:** Penurunan produksi menyebabkan potensi pengurangan tenaga kerja dan pelemahan ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada sektor industri.

	2024	Projections		Difference from January 2025 WEO Update <sup>1</sup>		Difference from October 2024 WEO <sup>1</sup>	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
<b>World Output</b>	<b>3.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.0</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>
<b>Advanced Economies</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.3</b>
United States	2.8	1.8	1.7	-0.9	-0.4	-0.4	-0.3
Euro Area	0.9	0.8	1.2	-0.2	-0.2	-0.4	-0.3
Germany	-0.2	0.0	0.9	-0.3	-0.2	-0.8	-0.5
France	1.1	0.6	1.0	-0.2	-0.1	-0.5	-0.3
Italy	0.7	0.4	0.8	-0.3	-0.1	-0.4	0.1
Spain	3.2	2.5	1.8	0.2	0.0	0.4	0.0
Japan	0.1	0.6	0.6	-0.5	-0.2	-0.5	-0.2
United Kingdom	1.1	1.1	1.4	-0.5	-0.1	-0.4	-0.1
Canada	1.5	1.4	1.6	-0.6	-0.4	-1.0	-0.4
Other Advanced Economies <sup>2</sup>	2.2	1.8	2.0	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3
<b>Emerging Market and Developing Economies</b>	<b>4.3</b>	<b>3.7</b>	<b>3.9</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.4</b>	<b>-0.5</b>	<b>-0.3</b>
Emerging and Developing Asia	5.3	4.5	4.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.3
China	5.0	4.0	4.0	-0.6	-0.5	-0.5	-0.1
India <sup>3</sup>	6.5	6.2	6.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2
Emerging and Developing Europe	3.4	2.1	2.1	-0.1	-0.3	-0.1	-0.4
Russia	4.1	1.5	0.9	0.1	-0.3	0.2	-0.3
Latin America and the Caribbean	2.4	2.0	2.4	-0.5	-0.3	-0.5	-0.3
Brazil	3.4	2.0	2.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3
Mexico	1.5	-0.3	1.4	-1.7	-0.6	-1.6	-0.6
Middle East and Central Asia	2.4	3.0	3.5	-0.6	-0.4	-0.9	-0.7
Saudi Arabia	1.3	3.0	3.7	-0.3	-0.4	-1.6	-0.7
Sub-Saharan Africa	4.0	3.8	4.2	-0.4	0.0	-0.4	-0.2
Nigeria	3.4	3.0	2.7	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3
South Africa	0.6	1.0	1.3	-0.5	-0.3	-0.5	-0.2
<i>Memorandum</i>							
World Growth Based on Market Exchange Rates	2.8	2.3	2.4	-0.6	-0.4	-0.5	-0.3
European Union	1.1	1.2	1.5	-0.2	-0.2	-0.4	-0.2
ASEAN-5 <sup>4</sup>	4.6	4.0	3.9	-0.6	-0.6	-0.5	-0.6
Middle East and North Africa	1.8	2.6	3.4	-0.9	-0.5	-1.4	-0.8
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.3	3.7	3.8	-0.5	-0.4	-0.5	-0.3
Low-Income Developing Countries	4.0	4.2	5.2	-0.4	-0.2	-0.5	-0.4
<b>World Trade Volume (goods and services)</b>	<b>3.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.5</b>	<b>-1.5</b>	<b>-0.8</b>	<b>-1.7</b>	<b>-0.9</b>
Imports							
Advanced Economies	2.4	1.9	2.0	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5
Emerging Market and Developing Economies	5.8	2.0	3.4	-3.0	-1.1	-2.9	-1.2
Exports							
Advanced Economies	2.1	1.2	2.0	-0.9	-0.6	-1.5	-1.0
Emerging Market and Developing Economies	6.7	1.6	3.0	-3.4	-1.7	-3.0	-1.3
<b>Commodity Prices (US dollars)</b>							
Oil <sup>5</sup>	-1.8	-15.5	-6.8	-3.8	-4.2	-5.1	-3.2
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	3.7	4.4	0.2	1.9	0.3	4.6	-0.6
<b>World Consumer Prices<sup>6</sup></b>	<b>5.7</b>	<b>4.3</b>	<b>3.6</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Advanced Economies <sup>7</sup>	2.6	2.5	2.2	0.4	0.2	0.5	0.2
Emerging Market and Developing Economies <sup>6</sup>	7.7	5.5	4.6	-0.1	0.1	-0.4	-0.1

Source: IMF staff estimates.

#### ❖ Analisa Keterkaitan Terhadap Perekonomian Kota Cilegon :

##### a) Pertumbuhan Ekonomi Global dan Dampaknya di Cilegon

Penurunan dalam pertumbuhan ekonomi global dapat memberikan dampak langsung pada sektor industri di Cilegon. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang paling terdampak dan mengembangkan strategi guna meminimalkan efek dari pelambatan ekonomi global.



Sumber : Narasi RPJMN 2025-2029, Bappenas, 2025

b) Inflasi dan Harga Komoditas:

Perubahan inflasi global dan fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi biaya produksi di Cilegon. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat terhadap perubahan ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dan mengurangi dampak dari fluktuasi harga yang terjadi.

c) Geopolitik dan Risiko Terkait:

Gangguan geopolitik, seperti konflik atau ketegangan perdagangan, dapat menghambat rantai pasok global, memperlambat produksi di Cilegon, serta meningkatkan biaya logistik. Memahami risiko ini sangat penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif.

d) Kebijakan Moneter dan Fiskal:

Perubahan kebijakan moneter global dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan ketersediaan kredit di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah kota Cilegon perlu memiliki kebijakan fiskal yang fleksibel untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi global.

❖ **Rekomendasi Arah Kebijakan Perekonomian Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Global**

1) Diversifikasi Sektor Ekonomi:

Mendorong diversifikasi dalam sektor-sektor ekonomi akan memperkuat ketahanan Cilegon terhadap perubahan ekonomi global. Investasi di

sektor-sektor yang lebih stabil dapat menciptakan daya tahan ekonomi jangka panjang.

2) Manajemen Risiko Harga Komoditas:

Penerapan strategi manajemen risiko yang tepat akan membantu Cilegon mengatasi ketidakstabilan harga komoditas. Penggunaan kontrak jangka panjang dan kemitraan strategis dapat memastikan pasokan bahan baku tetap terjaga.

3) Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Geopolitik:

Dengan mendiversifikasi sumber bahan baku dan mempererat hubungan dengan mitra dagang yang stabil, Cilegon dapat mengurangi dampak dari risiko geopolitik yang mempengaruhi rantai pasokan.

4) Penyesuaian Kebijakan Fiskal dan Moneter:

Mempersiapkan kebijakan fiskal yang adaptif dan menjaga kebijakan moneter yang seimbang akan membantu Cilegon menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah perubahan ekonomi global.

5) Stimulasi Investasi dan Inovasi:

Mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan, khususnya yang berkaitan dengan tren global seperti teknologi ramah lingkungan, akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan daya saing Cilegon di pasar global.

### **5.1.1 Proyeksi Ekonomi Nasional**

Kebijakan ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang bersifat proteksionis dan berorientasi domestik, telah memicu pergeseran fundamental dalam lanskap perekonomian global. Melalui peningkatan tarif impor, pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve, serta upaya relokasi rantai pasok dari Asia Timur, Amerika Serikat telah mempersempit ruang gerak perdagangan dan investasi internasional. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, merasakan tekanan ganda: dari sisi arus modal dan dari sisi perdagangan luar negeri.

Indonesia, sebagai negara dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada ekspor komoditas dan arus modal asing, terdampak secara

langsung dan tidak langsung. Ketika suku bunga AS naik, investor global cenderung menarik dananya dari pasar negara berkembang untuk dialihkan ke instrumen yang lebih aman dan menguntungkan di AS. Fenomena ini menyebabkan capital outflow yang signifikan dari Indonesia, menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam kondisi seperti ini, beban utang luar negeri meningkat dan biaya impor bahan baku serta barang modal melonjak. Bank Indonesia merespons dengan menaikkan suku bunga acuan demi menstabilkan nilai tukar dan menjaga laju inflasi, tetapi kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap konsumsi dan investasi domestik yang mulai melambat.

Di sisi perdagangan, dampak kebijakan tarif dan perlambatan permintaan global sangat terasa. Ekspor Indonesia, khususnya komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, dan besi-baja, mengalami penurunan baik dari segi volume maupun harga. Ketergantungan terhadap pasar utama seperti Tiongkok dan AS memperparah situasi, terutama ketika kedua negara tersebut sedang dalam tensi geopolitik dan ekonomi. Ketidakpastian ini menghambat perencanaan jangka panjang pelaku usaha Indonesia serta menurunkan surplus neraca dagang yang selama ini menjadi penyangga stabilitas eksternal.,

Lebih lanjut, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menarik investasi asing langsung (FDI). Ketika AS dan negara-negara Barat menggalakkan strategi reshoring atau friendshoring, sebagian besar aliran investasi baru cenderung diarahkan ke negara-negara yang dianggap lebih stabil secara politik dan ekonomi, atau yang telah memiliki perjanjian dagang strategis. Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, hambatan struktural seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur logistik yang belum merata, serta regulasi ketenagakerjaan yang dianggap rigid masih menjadi kendala utama.

Kondisi ini diperparah oleh tekanan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Melemahnya rupiah mendorong kenaikan harga barang impor, termasuk pangan dan energi, yang memukul daya beli masyarakat. Pemerintah terpaksa meningkatkan alokasi subsidi energi demi menjaga stabilitas harga, namun konsekuensinya adalah tekanan terhadap ruang fiskal negara. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh PDB nasional, mulai melemah seiring dengan penurunan daya beli dan suku bunga pinjaman yang tinggi.

Namun demikian, kondisi ini juga menjadi titik refleksi dan momentum

bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi. Pemerintah mendorong hilirisasi industri, khususnya pada sektor pertambangan seperti nikel dan bauksit, agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah, melainkan mampu memproduksi barang setengah jadi atau jadi, seperti baterai kendaraan listrik. Selain itu, perluasan pasar ekspor ke kawasan non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan menjadi agenda penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar utama yang saat ini penuh ketidakpastian.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia sedang berada dalam fase transisi yang kompleks. Dampak kebijakan ekonomi AS menunjukkan bahwa ketergantungan pada dinamika global tanpa fondasi domestik yang kuat akan menimbulkan kerentanan. Oleh karena itu, penguatan daya saing industri, perbaikan iklim investasi, pengembangan ekonomi digital, serta keberlanjutan reformasi struktural menjadi kunci untuk menjaga ketahanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.

#### ❖ **Analisa Keterkaitan Terhadap Perekonomian Kota Cilegon**

a. Perekonomian Nasional dan Perekonomian Cilegon:

Perekonomian kota Cilegon, yang berfokus pada ekspor bahan setengah jadi, sangat bergantung pada perekonomian nasional. Dengan harapan pertumbuhan perekonomian nasional mencapai 5,2-5,6 persen, diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi kinerja perekonomian Cilegon.

b. Belanja Infrastruktur Publik Nasional:

Rencana pembangunan kawasan terpadu rest area 97 yang terintegrasi dengan pelebaran jalan tol dari 2 lajur menjadi 3 lajur, serta perluasan jalan lintas Serang- Cilegon, diharapkan dapat menurunkan biaya logistik.

c. Kenaikan Investasi:

Dengan semakin membaiknya iklim investasi nasional, diharapkan dapat mendorong realisasi investasi di kota Cilegon, yang merupakan pusat

industri nasional.

❖ **Rekomendasi Arah Kebijakan Perekonomian Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Nasional**

a. Belanja publik infrastruktur pendukung

Dengan dibangunnya infrastruktur oleh pemerintah pusat, arah kebijakan infrastruktur diarahkan untuk lokasi-lokasi yang memiliki dukungan langsung terhadap infrastruktur nasional, selain itu pembangunan infrastruktur juga harus diarahkan terhadap infrastruktur yang dapat secara langsung memangkas biaya logistik dan transportasi.

b. Peningkatan Iklim Investasi Daerah

Peningkatan nilai investasi nasional harus didukung dengan kondisi daerah yang kondusif dan ramah investasi, arah kebijakan yang sejalan dengan kondisi tersebut adalah penyederhanaan izin, penegakkan hukum dan harmonisasi hubungan antara pelaku industri, pemilik modal dan kalangan pekerja.

**5.1.2 Proyeksi Ekonomi Regional**

Provinsi Banten memiliki struktur ekonomi yang sangat ditopang oleh sektor industri pengolahan. Data BPS menunjukkan bahwa lebih dari 40% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten berasal dari sektor industri, khususnya industri kimia, logam, otomotif, dan tekstil. Oleh karena itu, ketika permintaan global melemah akibat perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama seperti AS, Tiongkok, dan Uni Eropa, ekspor dari kawasan industri Banten pun ikut menurun. Hal ini berdampak langsung pada kapasitas produksi perusahaan, utilisasi tenaga kerja, dan kontribusi pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, penguatan dolar AS terhadap rupiah menimbulkan tantangan tambahan. Banyak perusahaan industri di Banten mengandalkan bahan baku dan mesin dari luar negeri. Kenaikan harga impor menyebabkan tekanan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong efisiensi tenaga kerja atau bahkan penghentian sementara operasional pabrik. Di sisi lain, daya beli pekerja industri yang terdampak— baik karena PHK maupun pemotongan

insentif—turut melemahkan konsumsi lokal. Ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan ekonomi daerah terhadap ekspor dan industri skala besar dapat menciptakan kerentanan sosial-ekonomi jika tidak disertai diversifikasi ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Banten juga menghadapi tantangan dalam menjaga iklim investasi yang kompetitif. Ketika negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina mempercepat penyediaan infrastruktur dan regulasi investasi, Banten harus mampu menunjukkan keunggulan kompetitifnya, terutama dalam penyediaan kawasan industri berstandar internasional, tenaga kerja terampil, serta kepastian hukum. Terlebih lagi, dengan adanya pengalihan investasi dari Tiongkok sebagai bagian dari strategi friendshoring oleh negara-negara Barat, Banten sebenarnya berpeluang menjadi destinasi investasi alternatif—tetapi peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika dilakukan reformasi di tingkat daerah.

Di sisi lain, penguatan hilirisasi industri yang menjadi kebijakan nasional juga perlu diterjemahkan di level provinsi. Banten memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri turunan dari sektor kimia dan baja. Jika berhasil mendorong industri bernilai tambah di kawasan industri seperti di Cilegon dan Serang, maka ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah dapat berkurang, dan ketahanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal menjadi lebih kuat. Hal ini juga akan membuka ruang kerja baru dan memperluas basis pajak daerah.

#### ❖ **Analisa Keterkaitan Terhadap Perekonomian Kota Cilegon**

##### a. Efisiensi Biaya Produksi

Arah kebijakan pembangunan di level regional diarahkan untuk mengurangi beban produksi sehingga dapat meningkatkan output ekonomi di Kota Cilegon yang memiliki basis dari sektor industri.

##### b. Penataan Wilayah Perkotaan yang Inklusif

Pelayanan kota yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang secara jangka panjang mampu meningkatkan kualitas kota itu sendiri.

#### ❖ **Rekomendasi Arah Kebijakan Perekonomian Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Nasional**

a. **Pembangunan Infrastruktur Pendukung Logistik Regional**

Arah kebijakan daerah dapat difokuskan terhadap membangun infrastruktur yang memiliki keterkaitan langsung terhadap infrastruktur logistik regional

b. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Perkotaan**

Arah kebijakan daerah dapat difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dasar yang memiliki keterkaitan langsung kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#### **5.1.3 Proyeksi Ekonomi Daerah**

Secara keseluruhan, Kota Cilegon menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun, baik dari segi laju pertumbuhan ekonomi maupun total PDRB. Namun, perlu dicatat bahwa struktur PDRB Kota Cilegon sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan, dengan kontribusi sekitar 55-59%. Pola pertumbuhan sektor industri dan LPE PDRB secara keseluruhan mengindikasikan bahwa ekonomi Kota Cilegon sangat bergantung pada sektor industri pengolahan, yang menunjukkan kerentanannya terhadap perubahan dalam sektor industri, terutama industri besar.

Basis ekonomi Kota Cilegon berfokus pada pengolahan bahan dasar menjadi bahan setengah jadi, dengan dua sektor dominan, yaitu industri pengolahan logam dan kimia. Kedua sektor ini menyumbang lebih dari 50% dari total PDRB Kota Cilegon selama 10 tahun terakhir. Meskipun kondisi perekonomian global masih fluktuatif dan mempengaruhi kinerja industri pengolahan di Cilegon, melihat tren historis yang menunjukkan kinerja sektor industri yang stabil, diperkirakan perekonomian Cilegon akan tetap tumbuh dengan pola yang serupa dari tahun-tahun sebelumnya, dengan proyeksi pertumbuhan antara 4,64 hingga 5,0 persen, didukung oleh belanja pemerintah pada tahun 2024,2025 dan rencana 2026.

Untuk target penurunan tingkat kemiskinan, angka yang direncanakan

pada Ranwal RPJMD sebesar 3,40-3,58% akan ditargetkan pada target konservatif sebesar 3,48% pada 2026. Penyesuaian ini mempertimbangkan kondisi geostrategis, dinamika politik internasional dan fenomena nasional lainnya. Meski demikian, target ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi di Kota Cilegon, yang mencapai 5,43%. Meskipun ada penurunan target, upaya pengentasan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, yang tercatat 0% pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat pengangguran yang diukur melalui indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan akan turun menjadi antara 5,97%.

Isu kesenjangan pendapatan merupakan isu yang memiliki tantangan yang besar di kota Cilegon, hal ini disebabkan oleh dominasi sektor industri yang melebihi 50% dari kontribusi PDRB, untuk menghadapi isu tersebut kota Cilegon akan mendorong tumbuhnya sektor lain melalui kemudahan perijinan berusaha, pelatihan bagi wirausaha baru dan akses permodalan untuk UMKM.

Secara lebih lengkap proyeksi indikator makro perekonomian Kota Cilegon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Indikator Makro Perekonomian Daerah**

<b>Indikator Makro Perekonomian</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target RPJMD (2026)*</b>	<b>Target RKPd 2026</b>
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	78,24	78,83	79,97	79,62
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,82	4,84	5,70	5,47
PDRB ADHB per Kapita (Rp. Juta)	287,5	302,8	321	321
Kontribusi PDRB ADHB Kota Cilegon terhadap Provinsi Banten	15,91	15,8	15,85	15,85
Tingkat Kemiskinan (%)	3,98	3,75	3,40-3.58	3,48
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,25	6,08	5,97	5,97

<b>Indikator Makro Perekonomian</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Target RPJMD (2026)*</b>	<b>Target RKPD 2026</b>
Indeks Gini (poin)	0,362	0,36	0,335-0,358	0,335
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)			15,85	15,85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	53,49	55,7	66,79	66,79

\*) Target 2026 menggunakan target pada Rancangan Awal RPJMD 2025-2029

## **5.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Penyelenggaraan pemerintahan mempunyai fungsi untuk mendorong dan memfasilitasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat lokal sehingga arah pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta dapat menyusun kebijakan keuangan yang tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah bermanfaat dalam pengelolaan dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Arah kebijakan keuangan yang tepat akan menghasilkan kondisi keuangan daerah yang semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah lebih menekankan pada upaya pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, termasuk juga pembiayaan daerah. Kebijakan ini lebih terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan keuangan daerah tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2026 adalah meningkatkan kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada regulasi tentang

pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada aspek pendapatan, kebijakan pendapatan diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap menjaga perekonomian. Sedangkan pada aspek belanja, kebijakan belanja daerah adalah meningkatkan kualitas belanja daerah agar efisien, produktif dan akutable.

Pada aspek pembiayaan, kebijakan pembiayaan dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan. Penerimaan pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk investasi dalam rangka penyertaan modal yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan mempedomani peraturan daerah tentang penyertaan modal serta pembentukan dana cadangan.

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR PENYUSUNAN R-APBD 2026**

**3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN RAPBN**

RPJMN 2025-2029	Rancangan RPJMD Provinsi 2025-2029	Rancangan RPJMD Kota Cilegon 2025 - 2029
<b>VISI :</b>	<b>VISI :</b>	<b>VISI :</b>
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi	Mewujudkan Cilegon yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
<b>MISI :</b>	<b>MISI :</b>	<b>MISI :</b>
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.	1. Memperkuat infrastruktur pendidikan dasar dan menengah untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi semua penduduk Cilegon
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2. Mendorong kemajuan ekonomi secara inklusif melalui penguatan sektor kreatif, unggulan, dan potensial	2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		

RPJMN 2025-2029	Rancangan RPJMD Provinsi 2025-2029	Rancangan RPJMD Kota Cilegon 2025 - 2029
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif.	3. Meningkatkan akses layanan kesehatan yang inklusif, berkualitas dan terjangkau
1. Memperkokoh ideologi Pancasila demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh	4. Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang didukung infrastruktur berkualitas	5. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk serta melestarikan lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara holistik dan resiliensi terhadap bencana	
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama	1. Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi	6. Meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan sosial masyarakat

RPJMN 2025-2029	Rancangan RPJMD Provinsi 2025-2029	Rancangan RPJMD Kota Cilegon 2025 - 2029
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan tangguh	

Prioritas Nasional	Pagu RKPD Kota Cilegon Tahun 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
<b>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</b>	<b>60.258.000.000</b>	2,66%
Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	170.000.000	0,01%
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	58.570.900.000	2,59%
Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	1.517.100.000	0,07%
<b>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</b>	<b>10.259.335.000</b>	0,45%
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	5.590.000.000	0,25%
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	142.360.000	0,01%
Rasio kewirausahaan (%)	550.000.000	0,02%
Rasio PDB Pariwisata (%)	3.756.975.000	0,17%
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	220.000.000	0,01%
<b>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</b>	<b>49.668.503.480</b>	2,19%
Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	5.385.000.000	0,24%
Indeks ekonomi hijau	290.000.000	0,01%
Indeks kualitas lingkungan hidup	8.765.000.000	0,39%
Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	185.000.000	0,01%
Kapasitas tampungan air (m <sup>3</sup> /kapita)	3.250.000.000	0,14%
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	4.039.300.000	0,18%
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1.800.000.000	0,08%
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	25.954.203.480	1,15%

Prioritas Nasional	Pagu RKPD Kota Cilegon Tahun 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
<b>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</b>	<b>136.245.022.167</b>	6,02%
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	1.271.824.003	0,06%
Persentase Desa Mandiri (%)	124.748.798.164	5,51%
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	300.000.000	0,01%
Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial yang Adaptif bagi Seluruh Penduduk (%)	9.924.400.000	0,44%
<b>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>	<b>5.660.189.328</b>	0,25%
Indeks Demokrasi Indonesia	5.660.189.328	0,25%
<b>Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas</b>	<b>302.572.618.297</b>	13,36%
Harapan lama sekolah (tahun)	145.524.935.000	6,43%
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1.012.500.000	0,04%
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	778.926.000	0,03%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	2.830.240.000	0,12%
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	21.000.000.000	0,93%
Rata-rata nilai PISA	6.500.425.000	0,29%
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	1.000.000.000	0,04%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.656.085.997	0,16%
Tingkat Penguasaan Iptek, a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	665.094.300	0,03%
Usia Harapan Hidup (tahun)	119.604.412.000	5,28%
<b>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</b>	<b>5.415.000.009</b>	0,24%
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1.900.000.009	0,08%
Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif	3.515.000.000	0,16%

Prioritas Nasional	Pagu RKPD Kota Cilegon Tahun 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
terhadap PDB (%)		
<b>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan</b>	<b>149.659.477.050</b>	6,61%
Indeks Integritas Nasional	21.536.220.000	0,95%
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	53.406.000	0,00%
Indeks Pelayanan Publik	115.695.151.050	5,11%
Indeks Persepsi Korupsi	1.512.000.000	0,07%
Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10.160.000.000	0,45%
Tingkat Inflasi (%)	702.700.000	0,03%
<b>Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh</b>	<b>82.030.000</b>	0,00%
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	82.030.000	0,00%
<b>Jumlah Alokasi Anggaran yang terkait dengan Prioritas Nasional</b>	<b>719.820.175.331</b>	<b>31,79%</b>

### 3.2 ASUMSI DASAR RAPBD PROVINSI

Tema yang terdapat pada RKP Pusat, RKPD Provinsi Banten dan RKPD Kota Cilegon memiliki sinkronisasi satu sama lain, Tahun 2026 menjadi tahun yang disambut penuh optimis dengan adanya kondisi politik yang lebih stabil pasca Pilpres dan Pilkada serentak, yang berdampak terhadap kondisi ekonomi yang lebih kondusif yang mendorong adanya percepatan pertumbuhan ekonomi.

Prioritas Provinsi Banten	Pagu RKPD Kota Cilegon Tahun 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
<b>Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh</b>	<b>217.713.150.041</b>	9,61%
Indeks Integritas Nasional	22.570.165.000	1,00%
Indeks Kualitas Kebijakan	69.375.534.254	3,06%
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3.453.877.010	0,15%
Indeks Profesionalitas ASN	6.864.440.727	0,30%

Prioritas Provinsi Banten	Pagu RKPD Kota Cilegon Tahun 2026	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
Nilai SAKIP	639.232.000	0,03%
Indeks Pelayanan Publik	114.809.901.050	5,07%
<b>Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial</b>	<b>39.094.224.328</b>	1,73%
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	10.765.450.000	0,48%
Indeks Demokrasi Indonesia	5.660.189.328	0,25%
Indeks Kedalaman Kemiskinan	9.968.785.000	0,44%
Nilai PDRB ADHK	5.959.800.000	0,26%
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto	570.000.000	0,03%
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	6.170.000.000	0,27%
<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif</b>	<b>278.387.534.006</b>	12,29%
Indeks Pembangunan Kebudayaan	1.940.000.009	0,09%
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	778.926.000	0,03%
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	2.830.240.000	0,12%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	4.913.585.997	0,22%
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4.000.000.000	0,18%
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	144.340.360.000	6,37%
Usia Harapan Hidup (UHH)	119.584.422.000	5,28%
<b>Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas</b>	<b>160.071.624.500</b>	7,07%
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	91.150.724.500	4,03%
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	7.485.000.000	0,33%
Rasio konektivitas	61.435.900.000	2,71%
<b>Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana</b>	<b>39.914.603.480</b>	1,76%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	35.684.203.480	1,58%
Meningkatnya Resiliensi Dan Ketahanan Terhadap Bencana	3.689.990.000	0,16%
Persentase Penurunan Emisi GRK : kumulatif	540.410.000	0,02%
<b>Jumlah Alokasi Anggaran yang terkait dengan Prioritas Provinsi Banten</b>	<b>735.181.136.355</b>	<b>32,47%</b>

### 3.3 ASUMSI DASAR RAPBD KOTA CILEGON

Arah kebijakan dan penahapan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 yang berfokus di Kota Cilegon diindikasikan dilaksanakan pada tahun 2028 hingga 2030 dengan fokus pembangunan sebagai berikut :

Misi Rancangan RPJMD Provinsi Banten	Penahapan Pembangunan
<p>Misi 2 : Mewujudkan pemerataan pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penguatan kolaborasi Jalan Tol Tangerang Raya-Jakarta, Jalan Strategis Kawasan Pusat pertumbuhan wilayah Serang <b>Cilegon</b>, Persampahan regional Lebak, SPAM Regional Lebak-Serang-Tangerang, mendukung konektivitas kawasan strategis, pusat pertumbuhan, dan kawasan industri (2028)</li> <li>2) Pengembangan inovasi untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Tangerang Raya Jakarta, Jalan Strategis Kawasan Pusat pertumbuhan wilayah Serang-<b>Cilegon</b>, Persampahan regional Lebak, SPAM Regional Lebak-SerangTangerang mendukung konektivitas kawasan strategis, pusat pertumbuhan, dan kawasan industri (2029)</li> <li>3) Pengembangan inovasi untuk percepatan pembangunan Jalan Tol Tangerang Raya Jakarta, Jalan Strategis Kawasan Pusat pertumbuhan wilayah Serang-<b>Cilegon</b>, Persampahan regional Lebak, SPAM Regional Lebak-Serang-Tangerang mendukung konektivitas kawasan strategis, pusat pertumbuhan, dan kawasan industri (2028)</li> <li>4) Penguatan kolaborasi pembangunan multi moda angkutan umum massal staregis MRT TangerangJakarta, reaktivasi rel kereta api Labuan, pelabuhan Bojonegara/<b>Ciwandan</b> dan Bandara Tangerang mendukung konektivitas megapolitan Jawa-Sumatra dan rantai pasok logistik industri strategis pada <b>kawasan industri</b> Serang <b>Cilegon</b>- Tangerang dan <b>pusat pertumbuhan wilayah</b> Serang - <b>Cilegon</b> (2028 - 2029)</li> <li>5) Penguatan kolaborasi dan inovasi pembangunan sarana dan prasarana energi listrik, sumber daya energi alternatif dan mineral mendukung keberlanjutan kualitas lingkungan pada kawasan</li> </ol>

<b>Misi Rancangan RPJMD Provinsi Banten</b>	<b>Penahapan Pembangunan</b>
	industri Serang – <b>Cilegon</b> – Tangerang , dan kawasan perkotaan Serang - <b>Cilegon</b> dan Kawasan perkotaan Tangerang (2028-2030)
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi terhadap Bencana	Peningkatan sarana dan prasarana, upaya pelestarian, kolaborasi serta inovasi pada kawasan resapan air dan sungai dan pencemaran air limbah pada kawasan hutan lindung, daerah aliran sungai di wilayah Lebak dan Pandeglang dan industri <b>Cilegon-Serang-Tangerang</b> (2026-2030)

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029

Mempedomani RPJMN 2025-2029, Arah kebijakan provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam tema pembangunan provinsi Banten yaitu sebagai Gerbang Integrasi Ekonomi Jawa-Sumatera dan Penyangga Ketahanan Rantai Nilai Industri Nasional, indikasi dan intervensi RPJMN terhadap rekomendasi kerja provinsi Banten yang berkaitan dengan Kota Cilegon adalah sebagai berikut :

<b>Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN 2025-2029 (Lokasi Prioritas Provinsi Banten - Kota Cilegon ) :</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD Provinsi banten 2025-2029 yang selaras dengan Arah Kebijakan Kota Cilegon</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan master plan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis;</li> <li>• Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN 2025-2029 (Lokasi Prioritas Provinsi Banten - Kota Cilegon ) :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Arah Kebijakan RPJMD Provinsi banten 2025-2029 yang selaras dengan Arah Kebijakan Kota Cilegon</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan;</li> <li>• Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten;</li> <li>• Pengembangan dan optimalisasi sumber daya air beserta pemanfaatan potensi ekonomi dan ekologi guna mendukung ketahanan air melalui bendung, waduk, situ dan sungai.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan</li> <li>• Pengembangan <b>koridor industri Cilegon-Serang-Tangerang</b> (sektor industri prioritas: industri kimia, industri makanan dan minuman, dan industri logam, besi, dan baja)</li> <li>• Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (kelapa sawit), dan <b>Pengembangan Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon (industri kimia dan logam dasar)</b></li> <li>• Pembangunan/ revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas (Kota Cilegon)</li> <li>• Pengembangan <b>Pelabuhan Ciwandan</b> – Cigading</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan optimalisasi kawasan permukiman yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pembangunan dan pengembangan hilirisasi <i>mother of industries</i>, industri halal, industri hijau, industri biru maupun Eco-Industrial Parks (EIPs) khususnya industri unggulan, potensial, dan berorientasi ekspor</li> <li>• Pengembangan kawasan strategis dan</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN 2025-2029 (Lokasi Prioritas Provinsi Banten - Kota Cilegon ) :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Arah Kebijakan RPJMD Provinsi banten 2025-2029 yang selaras dengan Arah Kebijakan Kota Cilegon</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan penyiapan</li> <li>• pembangunan Interkoneksi Sumatera Jawa (kawasan pulomerak sebagai gerbang Pulau Jawa)</li> <li>•</li> </ul>	<p>infrastruktur penunjang di selat sunda, sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan mengurangi inefisiensi waktu dan energi mobilitas barang dan jasa antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan/ peningkatan sarana dan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Kab/Kota.</li> <li>• Peningkatan jalur KA Rangkasbitung-Merak</li> <li>• Pembangunan TPST Regional Serang - Cilegon</li> <li>• Pelebaran Jalan Merak-Batas Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pelayanan kesehatan untuk menangani kasus gigi dan mulut, kasus kesehatan mental, kasus multi-penyakit pada lanjut usia, dan kasus ketergantungan obat;</li> <li>• Peningkatan kualitas layanan kesehatan (promotif, preventif, rehabilitatif dan kuratif), penyediaan sarana-prasarana kesehatan primer dan rujukan, pemerataan pelayanan kesehatan serta penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular dan tropis terabaikan, dan penuntasan stunting.</li> <li>• Pengembangan transportasi publik massal yang ramah lingkungan, nyaman, mudah diakses, aman, efisien, dan murah disertai fasilitas penunjang yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Pengelolaan sampah dan sanitasi yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Arah Pembangunan Kewilayahan pada RPJMN 2025-2029 (Lokasi Prioritas Provinsi Banten - Kota Cilegon ) :</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Arah Kebijakan RPJMD Provinsi banten 2025-2029 yang selaras dengan Arah Kebijakan Kota Cilegon</b></p>
<p>Cilegon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pekerjaan/ peningkatan Unit Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah</li> <li>• Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi berupa jalan baru, pengembangan, dan pemeliharaan kemantapan akses jalan</li> <li>• Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan penjaminan mutu pembelajaran, penguatan link and match sebagai bentuk kolaborasi dengan multipihak dalam pengelolaan pendidikan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan <b>Cilegon - Serang (PHTC)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Banten/ <b>Ciwandan/ Bojonegara</b> dan Cigading</li> <li>• Pengembangan dan optimalisasi kawasan permukiman yang inklusif, berkelanjutan dan berketahanan yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>

## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada penguatan pajak daerah dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi melalui prinsip pengurangan biaya administrasi dan kepatuhan, perluasan basis pajak, serta harmonisasi regulasi terkait pajak.

Pelaksanaan kebijakan penguatan pendapatan tersebut meliputi beberapa langkah berikut:

1. Restrukturisasi jenis pajak daerah dengan tetap mempertahankan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak berbasis konsumsi yang dialihkan menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, tujuan restrukturisasi ini adalah:
  - a) Menyelaraskan objek pajak antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari pemungutan pajak ganda;
  - b) Menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya pemungutan;
  - c) Memudahkan pemantauan pemungutan pajak secara terintegrasi oleh pemerintah daerah;
  - d) Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan penyederhanaan administrasi;
  - e) Melakukan penilaian individual terhadap objek pajak guna meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Penyederhanaan jenis retribusi dari 32 menjadi 18 layanan, dengan tujuan agar retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah efektif serta memiliki biaya pemungutan dan kepatuhan yang rendah. Rasionalisasi ini juga bertujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab daerah.
3. Perluasan basis pajak melalui penerapan opsi pajak sebagai pengganti

skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (seperti Opsen PKB, BBNKB, MLBB) tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

4. Peninjauan ulang tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memberikan insentif fiskal yang mendorong pertumbuhan investasi daerah dan mendukung kemudahan berusaha.
5. Peningkatan kinerja pemerintah daerah guna meningkatkan alokasi dana transfer keuangan, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana insentif daerah.

Beberapa komponen pendapatan yang mengalami perubahan signifikan akibat kebijakan ini antara lain:

- Perpindahan pendapatan dari BLUD di RSUD dan dana kapitasi JKN di Puskesmas (dalam kategori lain-lain PAD yang sah) menjadi pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan (Retribusi Daerah).
- Penambahan target pajak daerah yang bersumber dari Opsen PKB, BBNKB, dan MLBB.

Arah kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi anggaran, diperlukan, mengacu pada rancangan RPJMD 2025-2029 diperlukan upaya-upaya sebagai berikut di Tahun 2026 :

- Peningkatan Efisiensi dan Inovasi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Upaya akan diarahkan pada identifikasi potensi PAD baru yang belum tergali, revisi regulasi yang mendukung peningkatan penerimaan, serta modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan meminimalisir kebocoran. Edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak juga akan digencarkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

- Penguatan Tata Kelola Aset Milik Daerah

Penertiban administrasi dan legalitas aset daerah akan menjadi prioritas. Sistem inventarisasi dan penilaian aset berbasis digital akan diterapkan untuk memastikan data aset yang akurat dan *up-to-date*. Optimalisasi **pemanfaatan aset**, baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pengembangan potensi internal, akan dipertimbangkan untuk memberikan

nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok - Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk menghadapi tantangan global dan domestik yang semakin kompleks di tahun 2026 dituntut untuk bersifat ekspansif, terarah, dan terukur dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Kebijakan fiskal nasional sebagaimana tertuang dalam KEM-PPKF 2026 menekankan pentingnya mobilisasi pendapatan negara melalui reformasi fiskal, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Sejalan dengan arah tersebut, pemerintah kota perlu menyusun kebijakan fiskal yang responsif dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

Substansi yang tertuang dalam dokumen KEM-PPKF 2026 menuangkan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dan ruang fiskal daerah, beberapa strategi fiskal daerah yang dapat diambil mencakup :

- Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Optimalisasi penerimaan melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan basis data wajib pajak, serta penguatan kapasitas aparatur pengelola pajak. Ini mencakup pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penguatan pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak restoran berbasis real-time system.
- Pemanfaatan Aset Daerah Secara Produktif  
Pengelolaan aset daerah tidak lagi sekadar pencatatan, melainkan diarahkan pada penciptaan nilai tambah dan pendapatan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang idle dapat dilakukan melalui skema sewa, kerjasama pemanfaatan, atau kemitraan investasi.
- Penguatan Investasi dan Kerjasama Daerah Kota perlu menarik lebih banyak investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudahan perizinan, dan insentif fiskal daerah yang terukur. Kerja sama antardaerah maupun dengan pihak ketiga juga menjadi alternatif penting untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
- Inovasi Pendapatan Melalui Layanan Publik dan Digitalisasi Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), layanan digital pemerintah, dan

pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sumber PAD baru dari sektor pelayanan seperti kesehatan, pendidikan nonformal, dan transportasi publik.

- Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dan Dukungan Transfer ke Daerah Memastikan bahwa keselarasan kebijakan fiskal dengan prioritas nasional, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan Page | III-13 UMKM. Ini penting agar memperoleh alokasi dana transfer yang optimal, termasuk Dana Insentif Fiskal (DIF) berbasis kinerja.

Dengan pendekatan di atas, kebijakan fiskal daerah diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Harmonisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh instrumen fiskal bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

❖ **Secara umum proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut:**

- a. Proyeksi pendapatan pada KUA Tahun 2026 sebagaimana mengacu pada kerangka pendanaan dokumen RKPD Kota Cilegon Tahun 2026 belum memperhitungkan pendapatan yang berasal dari sumber dana insentif fiskal (DIF), Bantuan Keuangan Provinsi Banten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
- b. Proyeksi pendapatan asli daerah pada KUA 2026 masih diasumsikan sama dengan proyeksi pada RKPD Kota Cilegon Tahun 2026
- c. Selaras dengan belum dimasukkannya proyeksi pendapatan yang bersumber dana dari DAK (Dana Alokasi Khusus), DIF (Dana Insentif Fiskal) dan Bantuan Keuangan Provinsi, proyeksi belanja pada KUA 2026 belum memperhitungkan ketiga sumber anggaran tersebut. Penganggaran kegiatan yang bersumber dari ketiga sumber anggaran tersebut dilakukan setelah adanya penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

**4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Target pendapatan daerah tahun 2026 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 2 Target Pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2026**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARGET KUA 2026</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>980.000.000.000,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	779.584.623.245,00
4.1.02	Retribusi Daerah	142.742.850.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.148.800.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.523.726.755,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>936.841.743.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.523.143.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.318.600.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.916.841.743.000,00</b>

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA**

Kebijakan belanja daerah dalam KUA tahun 2026 secara umum berfokus pada peningkatan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel, yang diwujudkan melalui beberapa aspek berikut :

1. Meningkatkan mutu penganggaran belanja daerah dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu berbasis kinerja, khususnya untuk mendukung pencapaian target indikator program RPJMD 2021- 2026, 20 program prioritas daerah, 17 janji politik wali kota (berdasarkan rancangan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029), serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan mandatori pemerintah pusat (penanganan stunting, dukungan MBG dan koperasi merah putih, dsb) serta dukungan pencapaian target-target sustainable development goals (SDGs)
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah melalui optimalisasi instrumen penganggaran seperti optimalisasi SSH (Standar Satuan Harga) dan ASB (Analisis Standar Belanja), alokasi belanja daerah akan secara cermat digunakan untuk program-program yang memiliki dampak signifikan dan terukur terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan. Sistem penganggaran, dan evaluasi belanja akan diperkuat untuk mencegah pemborosan, tumpang tindih program, dan memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal.
3. Belanja daerah harus mencakup program pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran dan priotas pembangunan daerah, provinsi Banten dan nasional hingga 2026, dengan prioritas sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan menciptakan generasi unggul akan diwujudkan melalui serangkaian upaya strategis yang terintegrasi. Fokus utama terletak pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, penguatan ekosistem tumbuh kembang anak dan kepemudaan, serta pembangunan budaya literasi yang komprehensif.

- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini akan difokuskan pada lima pilar strategi utama: membangun ekosistem investasi yang adaptif, optimalisasi ruang dan kawasan ekonomi, peningkatan sektor pertanian dan perikanan berbasis teknologi, penumbuhan industri kreatif, serta peningkatan kompetensi angkatan kerja.
- 3) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar Kesehatan melalui peningkatan kualitas sarpras RSUD dan puskesmas, peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.
- 4) Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi melalui serangkaian strategi pembangunan yang terintegrasi. Upaya ini akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan prima, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas perumusan kebijakan melalui kolaborasi dan partisipasi publik.
- 5) Pemenuhan infrastruktur dan fasilitas permukiman, optimalisasi tata ruang dan fungsi RTH (ruang terbuka hijau), penataan wajah perkotaan, serta mengintegrasikan kebijakan pengelolaan sampah, penghijauan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha/dunia industri dalam upaya pelestarian lingkungan. Pada aspek peningkatan mitigasi bencana, difokuskan pada upaya penguatan mitigasi bencana berbasis tata ruang, peringatan dini, edukasi masyarakat dan siswa sekolah, serta koordinasi/kolaborasi lintas sektor khususnya industri.
- 6) Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi melalui pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), perluasan cakupan layanan sosial melalui puskesmas (pusat kesejahteraan sosial), serta peningkatan kualitas keluarga dan layanan perlindungan perempuan dan anak. Pada aspek ketahanan pangan, juga diperlukan perlu dilakukan upaya peningkatan produksi pangan lokal, akses terhadap teknologi pertanian, perluasan program subsidi dan insentif petani, serta mendorong diversifikasi sumber dan distribusi bahan

pangan lokal yang juga turut mendukung pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

4. Penguatan sinkronisasi dan keterkaitan program dengan mengalokasikan belanja daerah sesuai prioritas pembangunan, pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan layanan dasar (SPM), penurunan stunting, serta program prioritas nasional lainnya;
5. Meningkatkan standardisasi belanja daerah lewat penerapan standar satuan harga yang optimal dan analisis standar belanja, dengan acuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), serta optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk operasional pelayanan publik.
6. Alokasi belanja pemerintah daerah disusun berdasarkan sumber pendanaan yang diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan belanja tahun 2026 didasarkan pada kapasitas fiskal riil belanja daerah yang mengacu pada dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029. Beberapa belanja yang wajib dialokasikan oleh Kota Cilegon (*Mandatory Spending*) adalah belanja Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan, Pendidikan dan Pelatihan serta Kewilayahan. Kondisi alokasi belanja mandatory pada RKPD Kota Cilegon Tahun 2026 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belanja pendidikan (akumulasi seluruh OPD) Tahun 2026 sudah dialokasikan sebesar 23,33 %, sudah melebihi dari kewajiban (berdasarkan amanat peraturan/regulasi) sebesar 20%. Daftar sub kegiatan *mandatory spending* di Bidang Pendidikan saat ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Km.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi belanja pendidikan termasuk di dalamnya adalah alokasi gaji dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan.

Adapun rincian alokasi belanja pendidikan untuk Dinas Pendidikan di Tahun 2026 adalah sebesar 512,16 milyar atau sebesar 22,62 % terhadap total alokasi belanja di 2026.

2. Belanja kesehatan dialokasikan sebesar 450,69 milyar atau sebesar 19,9

% terhadap total belanja di 2026. Jika total gaji dan tunjangan ASN tidak dihitung dalam perhitungan, maka alokasi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah dikurangi gaji dan tunjangan adalah sebesar 25,17%.

3. Rencana belanja di bidang infrastruktur dialokasikan di Tahun 2026 sebesar 760,69 milyar atau 33,59%. Pemenuhan alokasi mandatory spending di Bidang Infrastruktur mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/Km.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Substansi dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik tidak terbatas pada belanja sarpras fisik semata, namun juga yang berkaitan dengan aktivitas pemenuhan layanan publik.

Alokasi belanja infrastruktur yang tercatat juga bukan hanya terbatas pada OPD pelaksana bidang urusan pekerjaan umum, namun juga mencakup berbagai bidang urusan pemerintahan seperti Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Alokasi infrastruktur pada RKPD Kota Cilegon Tahun 2026 adalah sebesar Rp 760,69 milyar ini memang diakui masih belum memenuhi Persentase Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Minimal sebesar 40%. Diharapkan dengan adanya alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non -Fisik yang akan dituangkan di tahap penganggaran, akan meningkatkan belanja infrastruktur dimaksud mendekati nilai 40% sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat.

4. Belanja pengawasan diluar gaji dan tunjangan dialokasikan sebesar 6,27 milyar atau sebesar 0,27% dari total belanja 2026. Nilai ini masih lebih rendah kewajiban berdasarkan amanat peraturan/perundang-undangan sebesar 0,50% terhadap kategori nilai belanja APBD diatas 2 triliun rupiah untuk tingkat kabupaten/kota. Namun mengingat kapasitas dan ruang fiskal daerah yang masih belum memadai, maka alokasi belanja pengawasan dioptimalkan dengan besaran alokasi dimaksud.
5. Belanja pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan ASN)

dialokasikan sebesar 3,62 milyar untuk menunjang pengembangan kompetensi teknis dan manajerial ASN, dengan proporsi belanja sebesar 0,16% terhadap total belanja tahun 2026.

6. Belanja kewilayahan dialokasikan sebesar 5,5% dari total belanja (selain DAK Fisik). Proporsi ini masih lebih tinggi dari mandatori/kewajiban pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan sebesar 5%, dengan total alokasi untuk 43 kelurahan sebesar 124,8 milyar rupiah di Tahun 2026.
7. Belanja hibah dialokasikan sebesar 71,06 milyar yang antara lain dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan salah satu prioritas daerah pada misi 1 RPJMD 2025-2029 yaitu Terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing (hibah untuk pembinaan cabang olahraga), misi 6 RPJMD Kota Cilegon Tahun 2025-2029, yaitu Fasilitasi peningkatan peran kader, Lembaga kebudayaan dan keagamaan dalam Pembangunan, dan lain sebagainya.
8. Total alokasi anggaran bantuan sosial adalah sebesar Rp 5.628.960.000 dengan peruntukkan antara lain untuk bantuan biaya pendidikan untuk siswa keluarga miskin yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, serta untuk pelaksanaan Program Bantuan Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat (Jscb) dan Bantuan Sosial Anak Yatim/Terlantar yang dikelola oleh Dinas Sosial.
9. Alokasi belanja subsidi diarahkan untuk memberikan bantuan subsidi bunga pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro di Kota Cilegon.

Dari uraian di atas maka sebagian besar belanja mandatori di Kota Cilegon sudah memenuhi kewajiban dari regulasi dalam hal perencanaan dan penganggaran belanja pembangunan.

Jika mengacu pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, kebijakan belanja daerah diarahkan mendorong pembangunan yang inklusif, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat transformasi ekonomi lokal. Prinsip yang dijalankan adalah belanja yang terarah, terukur, produktif, efisien, dan berkeadilan. Untuk itu, belanja daerah tahun 2026 difokuskan pada hal-hal berikut:

- **Meningkatkan Kualitas Belanja Publik**

Pemerintah kota perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan output dan outcome yang nyata. Ini mencakup evaluasi program berdasarkan kinerja, efisiensi biaya, serta kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Belanja diarahkan pada program yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian lokal, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.

- **Mendukung Program Prioritas Nasional di Daerah**

Daerah perlu menyelaraskan belanjanya dengan delapan prioritas nasional dalam KEM-PPKF 2026: (1) ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) program makan bergizi gratis (MBG), (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) pembangunan desa dan UMKM, (7) pertahanan semesta, dan (8) akselerasi investasi dan perdagangan global. Di tingkat daerah, belanja diarahkan misalnya untuk penguatan layanan gizi anak sekolah, revitalisasi pasar tradisional, atau pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan primer.

- **Penguatan Perlindungan Sosial dan Daya Beli**

Pemerintah kota diharapkan mengalokasikan belanja yang mendukung jaring pengaman sosial daerah, seperti bantuan sosial daerah, subsidi layanan dasar, dan pengurangan beban kelompok rentan. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

- **Akselerasi Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan**

Sejalan dengan agenda nasional digitalisasi, belanja diarahkan untuk memperkuat sistem informasi keuangan daerah, layanan publik berbasis digital, dan sistem pemantauan kinerja berbasis elektronik. Transformasi digital ini akan memperbaiki kualitas belanja dan transparansi anggaran.

- **Pemanfaatan Transfer ke Daerah secara Efektif**

Pemerintah pusat akan mentransfer dana dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, serta Dana Desa. Pemerintah kota perlu memanfaatkan instrumen ini untuk mendanai prioritas pembangunan daerah yang mendukung agenda nasional.

Penggunaan DAK fisik, misalnya, diarahkan untuk infrastruktur pendidikan, sanitasi, dan transportasi lokal yang mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi.

- **Pengendalian Belanja Operasional**

Pemerintah kota perlu melakukan efisiensi belanja operasional agar lebih banyak ruang fiskal tersedia bagi belanja modal dan belanja yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Reformasi belanja pegawai, perjalanan dinas, serta konsumsi rutin perlu terus dilakukan untuk menghindari pemborosan fiskal.

Dengan strategi belanja seperti di atas, pemerintah tidak hanya akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berperan aktif dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

## 5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga pada tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 3 Rencana Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun 2026**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	992.580.521.853,96
	Belanja Barang dan Jasa	690.599.887.808,68
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	467.000.000,00
	Belanja Hibah	76.436.252.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.305.860.000,00
	Belanja Imbalan	0,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	37.075.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.338.826.236,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.869.005.100,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.493.610.001,36
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.064.821.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	10.610.959.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00

## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk investasi dalam rangka penyertaan modal yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabel dan tentunya mempedomani dan dipayungi peraturan daerah tentang penyertaan modal serta pembentukan dana cadangan, di 2026 alokasi untuk pengeluaran pembiayaan, terutama penyertaan modal adalah sebesar 5 milyar, namun masih bersifat indikatif karena pelaksanaannya masih menunggu penetapan regulasi kebijakan penyertaan modal dan instrumen rencana kebijakan/kegiatan investasi yang selesai di penghujung tahun 2025.

### **6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dilaksanakan secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran yang bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD. Di 2026, indikasi penerimaan pembiayaan diperoleh dari asumsi SILPA Tahun 2025 sebesar 40 milyar.

### **6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam beberapa tahun terakhir diarahkan untuk investasi dalam rangka penyertaan modal yang pengalokasiannya didasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabel dan tentunya mempedomani dan dipayungi peraturan daerah tentang penyertaan modal serta pembentukan dana cadangan, di 2026 alokasi untuk pengeluaran pembiayaan, terutama penyertaan modal adalah sebesar 5 milyar, namun masih bersifat indikatif karena pelaksanaannya masih menunggu penetapan regulasi kebijakan penyertaan modal dan instrumen rencana kebijakan/kegiatan investasi yang selesai di penghujung tahun 2025.

**Tabel 4 Rencana Pembiayaan Daerah Kota Cilegon  
Tahun 2026**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.000.000.000,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>40.000.000.000,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>35.000.000.000,00</b>

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Pada periode tahun 2025-2029 pembangunan ditujukan untuk mewujudkan kota yang tertata dan sejahtera berbasis SDM unggul dan pelayanan dasar yang berkualitas dengan fokus pada pembangunan pondasi ekonomi inklusif, pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan sumber daya manusia yang produktif, pemenuhan infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan periode pentahapan 2025-2029, upaya super prioritas (*game changer*) pencapaian visi dan misi RPJPD Kota Cilegon ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 5 Arah kebijakan Super Prioritas Periode I  
RPJPD 2025 -2045 (RPJMD 2025-2029)**

<b>Upaya Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 - 2045 (RPJMD 2025-2029)</b>
<b>Misi 1 RPJPD: Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>
<b>Pengembangan industri berbasis ekonomi sirkular melalui pemberdayaan pelaku IKM dan UMKM</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong pertumbuhan kawasan Eco-industrial Park (EIPs) sebagai stimulus perkembangan “industri antara” dan entitas pelaku usaha yang mendukung prinsip-prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular</li> <li>• Hilirisasi dan penguatan industri unggulan yang potensial dan berorientasi ekspor, baik pada industri padat karya terampil, padat modal maupun padat teknologi.</li> </ul>
<b>Upaya Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 - 2045 (RPJMD 2025-2029)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalisasi prinsip-prinsip produksi, penggunaan &amp; pengolahan barang/jasa berbasis ekonomi sirkular serta pemanfaatan teknologi dan energi baru terbarukan kepada pemerintah, masyarakat dan produsen (khususnya pelaku IKM dan UMKM)</li> </ul>

<b>Akselerasi digitalisasi dan peningkatan produksi ekonomi kreatif</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan pusat kreativitas dan inkubasi industri/usaha kreatif untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan akses komunikasi, konektivitas, dan teknologi informasi bagi pelaku UMK dan IKM</li> </ul>
<b>Transformasi Lembaga Pelatihan Kerja menjadi Lembaga Pengembangan SDM, Inovasi dan inkubasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas sarana prasarana, instruktur dan tenaga pengelola pelatihan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan fondasi digitalisasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi</li> </ul>
<b>Misi 2 RPJPD : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berakhlak Mulia</b>
<b>Penguatan ekosistem Pendidikan yang adaptif</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, serta penguatan <i>link and match</i> sebagai bentuk kolaborasi dengan multipihak dalam pengelolaan pendidikan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>Center of Excelent (CoE)</i> sebagai ruang untuk pengembangan keahlian khusus pada bidang spesifik serta peningkatan kualitas kependidikan dan guru.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pendidikan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tata kelola pendidikan secara adaptif serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pendidikan</li> </ul>
<b>Upaya Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 - 2045 (RPJMD 2025-2029)</b>
<b>Transformasi sistem pelayanan Kesehatan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan dan pemerataan akses layanan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan yang berkualitas dan pemenuhan rasio ideal jumlah tenaga medis terhadap jumlah penduduk di Kota Cilegon.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan upaya promotif dan preventif melalui revitalisasi dan optimalisasi layanan posyandu, puskesmas dan laboratorium kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan dan penuntasan eliminasi penyakit prioritas, menular dan tropis terabaikan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan dan pemerataan layanan rujukan dan basis data kesehatan yang integratif melalui optimalisasi sistem jejaring puskesmas, rumah sakit dan unit-unit layanan kesehatan lainnya.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi sistem pembiayaan kesehatan secara lebih efektif dan merata yang disertai dengan internalisasi penerapan pola hidup sehat kepada masyarakat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan sistem pengendalian kualitas (<i>quality control system</i>) untuk mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan</li> </ul>
<p><b>Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan satu sistem registrasi sosial ekonomi sebagai basis data dalam penuntasan masalah kemiskinan dan perlindungan sosial</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pembangunan dan penuntasan ketimpangan sosial serta perlindungan terhadap dampak guncangan ekonomi, perubahan iklim dan bencana</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan sosial yang kolaboratif dan adaptif untuk memperkuat pengamanan sosial dan pemberdayaan khususnya untuk kelompok rentan dan marginal</li> </ul>
<p><b>Penguatan peran lembaga keagamaan dan kebudayaan</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan lembaga keagamaan dan kebudayaan berbasis kebutuhan</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Misi 3 RPJPD: Mewujudkan Kota yang Maju dan Berkelanjutan</b></p>
<p><b>Konservasi lingkungan hidup terpadu serta ketahanan energi, air, pangan dan resiliensi bencana</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi lingkungan dan penanganan bencana terintegrasi.</li> </ul>
<p><b>Upaya Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 - 2045 (RPJMD 2025-2029)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat tata kelola air melalui penerapan teknologi sirkular dalam pengelolaan air limbah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu-hilir yang berkelanjutan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan panganekaragaman pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai karakteristik dan potensi daerah.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan energi terbarukan guna mendukung ketahanan energi</li> </ul>
<p><b>Penataan kawasan strategis daerah sebagai pintu gerbang Pulau Jawa</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Kawasan Merak sebagai wajah Kota Cilegon, yang tidak hanya berperan sebagai penghubung Jawa-Sumatera namun dapat dikembangkan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi wilayah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi <i>grand design</i> dan rencana detil tata ruang perkotaan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konektivitas jaringan jalan mantap yang terintegrasi dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, sebagai akses ekonomi dan sosial yang inklusif (multi moda dan multi aktivitas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi dan pengembangan wisata alam yang berkelanjutan untuk mendukung konservasi dan pelestarian alam serta menjadi peluang usaha sektor pariwisata</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Misi 4 RPJPD: Mewujudkan Tata Kelola yang Kolaboratif dan Adaptif</b></p>
<p><b>Sistem kerja dinamis dan proses bisnis adaptif</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan dan penyelarasan proses bisnis, kerangka kerja, dokumen perencanaan dan sistem informasi untuk mewujudkan sistem kerja yang lincah, adaptif dan kolaboratif demi merespon isu strategis pembangunan.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun data spasial pembangunan (sektoral) yang integratif sebagai daya dukung optimalisasi dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan kemajuan teknologi digital serta penerapan sistem pengendalian kualitas untuk optimalisasi penyelenggaraan pelayanan birokrasi dan pelayanan publik yang prima, efisien, efektif, transparan dan adaptif</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang <i>agile</i> dan peningkatan kualitas ASN yang memiliki etika kerja, bebas korupsi dan profesional menuju pelayanan prima.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Upaya Super Prioritas Periode I RPJPD 2025 - 2045 (RPJMD 2025-2029)</b></p>
<p><b>Penguatan manajemen talenta dan peningkatan <i>digital talent</i> ASN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penerapan nilai-nilai utama (<i>core value</i>) ASN dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan manajemen talenta melalui penyediaan seluruh standar kompetensi jabatan, pembangunan <i>assessment center</i>, ketersediaan profil pegawai berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi, ketersediaan rencana suksesi sesuai standar kompetensi, manajemen kinerja, dan pengisian jabatan berdasarkan <i>talent pool</i>.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan dan pengembangan kompetensi Digital talent ASN untuk akselerasi <i>digital governance</i> dan merespon tuntutan transformasi digital pada masa depan.</li> </ul>
<p><b>Misi 5:</b></p> <p><b>Mewujudkan kondusivitas daerah, demokrasi berkualitas dan kemandirian fiskal yang kokoh</b></p>
<p><b>Kemandirian fiskal Daerah yang adaptif</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan elektronifikasi transaksi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan intensifikasi melalui tata kelola yang efektif dan efisien</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan kebijakan pendapatan daerah untuk mengurangi kebergantungan Dana transfer secara bertahap dan terukur</li> </ul>
<p><b>Keamanan daerah dan demokrasi yang berkualitas serta kerjasama daerah yang kolaboratif dan inovatif</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan ketentraman, ketertiban dan keamanan, melalui sanksi hukum untuk mewujudkan keamanan dan kondusivitas daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan demokrasi yang substansial melalui pendekatan partisipasi, keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kerjasama daerah yang berorientasi pada penguatan layanan publik dan mempercepat pemenuhan hak-hak masyarakat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan keterlibatan dan kolaborasi dengan mitra, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan dan pendanaan.</li> </ul>

Arah kebijakan setiap misi pada periode I RPJPD (2025-2029) diuraikan sebagai berikut :

A. Misi I : Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tahapan periode I : Membangun Pondasi Ekonomi Inklusif

**Periode 1 (2025-2029)** mengkerangkai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam tema **“membangun pondasi ekonomi inklusif”**. Penyempurnaan pembangunan atas modal yang dimiliki oleh Kota Cilegon dilakukan untuk menguatkan pilar-pilar inklusifitas. Pada tahap ini seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat turut serta menjalankan proses pembangunan dan merasakan hasil pembangunan.

Peran dari seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menciptakan pondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depannya. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahap 1 dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Membangun ekosistem investasi yang adaptif dan suportif
2. Penyiapan penumbuhan kawasan strategis ekonomi
3. Pemenuhan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung aktivitas ekonomi
4. Penyiapan *platform*, instrumen dan ekosistem yang mendukung pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) "naik kelas" dan menjadi bagian dari *supply chain* lokal, nasional bahkan global.
5. Penguatan fungsi dan pelayanan pasar rakyat dan pusat aktivitas ekonomi lainnya.
6. Menyediakan pusat-pusat aktivitas untuk menunjang inovasi dan kolaborasi *penta-helix* antara bisnis, akademisi, media, masyarakat dan pemerintah.
7. Menyediakan kawasan wisata dan edukasi tematik.
8. Peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi angkatan kerja sesuai pasar kerja.

B. Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berakhlak Mulia Tahapan periode I : Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan peningkatan sumber daya manusia yang produktif.

**Periode 1 (2025-2029)** dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak memiliki tema berupa **“Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta peningkatan sumber daya manusia yang produktif”**. Pemenuhan dan pemerataan akses pelayanan dasar serta perlindungan sosial akan menjadi fondasi utama yang akan membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Arah kebijakan pembangunan bidang SDM dan sosial pada periode pertama RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
2. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Peningkatan cakupan layanan perlindungan sosial
4. Peningkatan peran keluarga dalam pembangunan manusia
5. Optimalisasi peran nilai agama dan budaya dalam setiap aspek kehidupan
6. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam rangka perluasan cakupan pelayanan dasar, peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan peran keluarga serta optimalisasi nilai agama dan budaya.

C. Misi III : Mewujudkan Kota yang Maju dan Berkelanjutan

Tahapan periode I : Pemenuhan Infrastruktur Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan

**Periode 1 (2025-2029)** merupakan tahapan arah kebijakan mewujudkan kota yang maju dan berkelanjutan dengan tema “**pemenuhan infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan**”. Berbagai capaian kinerja infrastruktur wilayah yang dilaksanakan menjadi modal untuk dapat melakukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perkotaan pada berbagai sektor dengan menguatkan aspek kelembagaan serta regulasi. Arah kebijakan pemenuhan infrastruktur kota yang inklusif dan berkelanjutan periode 1 sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan *grand design* penataan ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, persampahan dan kebencanaan; sebagai upaya untuk penguatan database penanganan infrastruktur yang terintegrasi dan terupdate secara berkala.
2. Penguatan kelembagaan dan SDM penataan ruang, infrastruktur, lingkungan hidup, persampahan, dan kebencanaan; tata kelola penataan ruang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kota yang maju dan berkelanjutan.
3. Peningkatan penyediaan RTH dan Penataan Estetika Kota; pemenuhan kebutuhan RTH sesuai regulasi tata ruang yakni 20% untuk wilayah perkotaan.
4. Pemenuhan sarpras transportasi yang ramah lingkungan.
5. Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
6. Pembangunan infrastruktur pengendali bencana dan konservasi sumber daya air yang terpadu. Kondisi daya dukung air yang sudah defisit mengharuskan pengelolaan sumber daya air dan limpasan air hujan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta diintegrasikan dengan infrastruktur pengendali bencana.
7. Penguatan pengelolaan persampahan, dengan cara pengoptimalan sistem pengangkutan sampah secara menyeluruh, pemenuhan infrastruktur TPSA Bagendung, peningkatan kesadaran masyarakat dan kolaborasi stakeholder dalam penataan kota serta pengelolaan sampah dan lingkungan hidup
8. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, dengan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar permukiman serta penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
9. Pengembangan inovasi dan kolaborasi dalam pemenuhan air baku dan pengolahan air siap minum.
10. Pengelolaan sumber daya alam, ketahanan pangan dan pengembangan

EBT (energi baru terbarukan), dengan memanfaatkan kondisi sumber daya yang terbatas sebagai wilayah perkotaan dengan mengembangkan energi terbarukan untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat.

#### 11. Pengelolaan pangan berkelanjutan

#### D. Misi IV : Mewujudkan Tata Kelola yang Kolaboratif dan Adaptif

Tahapan periode I : Memperkuat Fondasi Tata Kelola Pemerintahan dan Transformasi pembentukan produk hukum daerah

**Periode 1 (2025-2029)** dalam mewujudkan tata kelola kolaboratif dan adaptif memiliki tema berupa **“memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan dan transformasi pembentukan produk hukum daerah”**.

Berbagai capaian kinerja tata kelola pemerintahan menjadi modal untuk menguatkan aspek manajemen dan kolaborasi pemerintahan serta penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan pemahaman hukum masyarakat yang meningkat. Arah kebijakan pembangunan tata kelola periode 1 sebagai berikut:

1. **Transformasi penguatan pembentukan produk hukum daerah dan peningkatan pemahaman hukum masyarakat**, yang dilaksanakan melalui penerapan reformulasi dan simplifikasi pembentukan produk hukum daerah yang taat azas dan adaptif, penguatan kualitas SDM aparatur perancang peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah yang efektif dan berkesinambungan, serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat.
2. **Penguatan kelembagaan dan birokrasi pemerintahan**, yaitu melalui pembentukan postur birokrasi yang tepat fungsi dan efektif, redistribusi pegawai, proses bisnis yang adaptif, fleksibilitas sistem kerja ASN.
3. **Penguatan kualitas manajemen ASN**, yang mencakup pembangunan sistem manajemen talenta ASN dan pelaksanaan sistem merit.
4. **Transformasi digital pemerintah daerah**, yaitu terutama melalui penguatan SPBE dan peningkatan talenta digital ASN.
5. **Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dinamis**, yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif, sehingga dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
6. **Akuntabilitas pemerintah daerah**, yaitu melalui penguatan seluruh komponen akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi kinerja.
7. **Penguatan peran aktor non-pemerintah**, yaitu melalui penguatan kondusifitas sosial, pemberdayaan masyarakat sipil, sinkronisasi peran sektor bisnis dan pemerintah daerah.

E. Misi V : Mewujudkan kondusivitas daerah, demokrasi berkualitas dan kemandirian fiskal yang kokoh

Tahapan periode I : Memperkuat keamanan daerah, demokrasi dan kemandirian fiskal serta kerja sama daerah yang kokoh

**Periode 1 (2025-2029)** dalam mewujudkan keamanan daerah yang tangguh dan stabilitas ekonomi daerah yang kokoh memiliki tema berupa **“Memperkuat Keamanan Daerah, Demokrasi dan Kemandirian Fiskal”**. Transformasi kebijakan fiskal dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap TKD akan menjadi fondasi utama untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, peran partai politik dalam pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keamanan daerah yang tangguh. Arah kebijakannya pada periode pertama RPJPD adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan kebijakan fiskal dan penguatan pendapatan daerah** melalui penguatan sumber-sumber PAD, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan kepada transfer keuangan daerah.
2. **Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban umum**, yaitu melalui upaya penguatan regulasi, tata kelola dan sumber daya aparatur.
3. **Penguatan peran partai politik dalam pendidikan politik**, yaitu melalui penguatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.
4. **Penguatan kerja sama daerah untuk pengelolaan kawasan perkotaan**, yaitu melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah.

Mengacu pada penjabaran visi dan misi di atas strategi pencapaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, arah kebijakan nasional dan provinsi, serta karakteristik ekonomi lokal Kota Cilegon yang sangat bergantung pada sektor industri pengolahan. Dengan latar belakang tersebut, strategi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas belanja publik, dan menjaga keseimbangan fiskal daerah secara berkelanjutan.

Dalam aspek pendapatan daerah, strategi diarahkan pada penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, penyederhanaan jenis pajak dan retribusi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta perluasan basis pajak melalui penerapan opsi pajak seperti Opsen PKB, BBNKB, dan MLBB. Pemerintah Kota Cilegon juga akan melakukan penilaian ulang terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan secara individual untuk meningkatkan akurasi nilai pajak dan potensi penerimaan. Di sisi lain, penguatan tata kelola aset daerah menjadi prioritas, dengan penerapan sistem inventarisasi dan penilaian aset berbasis digital serta optimalisasi pemanfaatan aset melalui kerja sama strategis dengan pihak ketiga.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tetap menjadi komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, strategi pencapaian pendapatan juga mencakup peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal (DIF), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Sinkronisasi program daerah dengan prioritas nasional dan provinsi akan diperkuat untuk meningkatkan daya saing usulan pendanaan Kota Cilegon.

Dalam aspek belanja daerah, strategi diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. Belanja daerah akan difokuskan pada pencapaian target RPJMD 2025–2029, pemenuhan janji politik kepala daerah, pelaksanaan program prioritas nasional seperti penurunan stunting dan makanan bergizi gratis, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Optimalisasi instrumen penganggaran seperti Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) akan dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Belanja mandatori menjadi perhatian utama dalam strategi belanja tahun 2026. Alokasi belanja pendidikan telah ditetapkan sebesar 23,33% dari total belanja, melebihi kewajiban minimal 20% sesuai regulasi. Belanja kesehatan dialokasikan sebesar 19,9%, dan jika gaji ASN dikecualikan, proporsinya mencapai 25,17%. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 33,59%, meskipun masih di bawah ambang batas 40% yang ditetapkan pemerintah pusat. Diharapkan alokasi DAK Fisik dan Non-Fisik yang akan

ditetapkan kemudian dapat meningkatkan proporsi belanja infrastruktur mendekati target nasional. Belanja pengawasan, pengembangan kompetensi ASN, dan kewilayahan juga telah dialokasikan sesuai ketentuan, meskipun masih perlu optimalisasi dalam pelaksanaannya.

Strategi belanja juga mencakup prioritas pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan perlindungan sosial, penataan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup. Program-program pembangunan akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi Cilegon, mendorong hilirisasi industri, pengembangan sektor ekonomi kreatif, dan peningkatan kompetensi angkatan kerja.

Dalam aspek pembiayaan daerah, strategi pencapaian diarahkan pada penyediaan dana untuk menutup defisit anggaran melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar Rp40 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah, khususnya penyertaan modal, direncanakan sebesar Rp5 miliar, namun masih bersifat indikatif dan akan disesuaikan dengan regulasi kebijakan investasi yang akan ditetapkan pada akhir tahun 2025. Prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan efisiensi akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembiayaan daerah, dengan fokus pada investasi yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, strategi pencapaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Cilegon Tahun 2026 disusun untuk memastikan keberlanjutan fiskal, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pencapaian target pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan RPJPD 2025–2045. Strategi ini juga mempertimbangkan tantangan eksternal seperti dinamika ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian geopolitik, serta peluang yang muncul dari pembangunan infrastruktur nasional dan peningkatan iklim investasi. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Cilegon dan memperkuat fondasi pembangunan daerah menuju visi “Cilegon Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

## **BAB VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Kota Cilegon Tahun 2026 disusun dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas serta tercapainya sasaran pembangunan yang efektif dan efisien, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya akan dijadikan dasar disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026.

Tahun 2026 merupakan titik momentum dalam histori perencanaan dan tata kelola pembangunan daerah, yang juga berimplikasi pada penyeragaman periodisasi dan penyelarasan dokumen perencanaan di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun nasional serta merupakan awal implementasi perencanaan pembangunan yang sudah mulai mengacu pada strategi dan arah kebijakan pada dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD Kota Cilegon Tahun 2025-2045) yang juga merupakan turunan dari visi RPJPN “Indonesia Emas 2045”.

Semoga Pemerintah Kota Cilegon bersama-sama dengan DPRD Kota Cilegon dapat terus bersinergi guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

Cilegon,            November 2025

Walikota Cilegon,

TTD

**ROBINSAR**